



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

URGENSI PENGATURAN KEWENANGAN PROFESI GURU DALAM MEMBERIKAN SANKSI MENDIDIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Strata 1 (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH:

NASYABANDI AKBAR
301221010010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Nama : Nasyabandi Akbar
NIM : 301221010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakikatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila di kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik.

Tembilahan, 20 Mei 2026

Hormat saya,



NASYABANDI AKBAR



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasyabandi Akbar
NIM : 301221010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum
Pembimbing I : Jamri, S.H., M.H
Pembimbing II : KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING		KETERANGAN	PARAF
		I	II		
1	11/5-2026		✓	REVISI BAB I LATAR BELAKANG MASALAH	1
2	14/5-2026		✓	HASIL PEMBAHASAN	2
3	20/5-2026		✓	KESIMPULAN DAN SARAN	3
4	22/5-2026		✓	LANJUT ACC PEM I	4
5	25/5/2026	✓		Perbaiki Latar Belakang	5
6	26/5/2026	✓		Lengkapi sumber pernyataan, kata pendantar, dll!	6
7	27/5/2026	✓		Disatukan semuanya	7
8	3/6/2026	✓		ACC	8

Tembilahan, 20 Mei 2026

Dekan Fakultas Hukum
Unisi,

Dr. Alf Azhar, S.Sos., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nasyabandi Akbar
NIM : 301221010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum

Tembilahan, 20 Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Jamri, S.H., M.H

KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unisi

Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
☎ 0853 6330 1314 📠 (0768) 21386 🌐 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor 068/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, Rabu, 22 Juli 2026, telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum:

Nama : Nasyabandi Akbar
NIM : 301221010010
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil : A
Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan, 12 Agustus 2026

Tim Penguji

1. Jamri, S.H., M.H
2. KMS Novyar Satriawan Fikri, SH., M.H
3. Syariffuddin, S.H., M.H
4. Darmiwati, S.H., M.H
5. Dr. Feni Puspitasari, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. Ali Azhar S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum

(Pembimbing: Jamri, S.H., M.H dan KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang tegas mengenai kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik, menganalisis urgensi pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum, serta merumuskan konsep ideal pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, dan argumentatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mengatur secara khusus bentuk, batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan penafsiran yang luas terhadap tindakan disiplin yang dilakukan guru. Kondisi tersebut mengakibatkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pembinaan peserta didik. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik memiliki urgensi yang tinggi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Adapun konsep ideal yang dapat diwujudkan adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur bentuk, batasan, dan mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga tercipta kepastian hukum yang berkeadilan bagi guru maupun peserta didik.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



The Urgency of Regulating Teachers' Professional Authority in Imposing Educational Sanctions on Students from the Perspective of Legal Certainty

(Supervisors: Jamri, S.H., M.H. and KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H.)

ABSTRACT

This research is motivated by the absence of explicit regulations concerning teachers' professional authority to impose educational sanctions on students, resulting in legal uncertainty in the implementation of guidance and disciplinary enforcement within educational institutions.

This study aims to examine the regulation of teachers' professional authority in imposing educational sanctions on students, analyze the urgency of such regulation from the perspective of legal certainty, and formulate an ideal concept for its regulation from the perspective of fair legal certainty.

This research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis of legal materials was conducted descriptively, interpretatively, and argumentatively using deductive reasoning.

The results of the study indicate that there are currently no explicit and comprehensive regulations governing teachers' authority to impose educational sanctions on students. Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers does not specifically regulate the forms, limitations, or mechanisms of educational sanctions, while Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection gives rise to broad interpretations of disciplinary measures carried out by teachers. This condition creates a legal vacuum and legal uncertainty for teachers in carrying out their role in guiding students. Therefore, regulating teachers' authority to impose educational sanctions is highly urgent in order to provide legal certainty and legal protection for teachers in performing their professional duties. The ideal concept that may be implemented is through the amendment of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers or the enactment of a new law specifically regulating the forms, limitations, and mechanisms of educational sanctions imposed by teachers based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, thereby creating fair legal certainty for both teachers and students.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.